

Dari Pergolakan Mutakhir di Malaysia

Oleh Ariel Heryanto

TANGGAL 4 Juli 1986 Radio Australia melaporkan pergolakan sosial cukup serius, yang terjadi pada minggu-minggu ini di Malaysia. Masalahnya berkaitan dengan perkembangan bahasa nasional. Walau tidak secara langsung, peristiwa itu membukakan pandangan kita pada suatu masalah besar di Indonesia sendiri, yang selama ini terabaikan.

Kaum elite di Indonesia sering membanggakan bahasa nasionalnya. Dikatakan, bahwa kita lebih beruntung daripada banyak bangsa baru merdeka, yang masih bertikai dalam memilih satu bahasa nasional atau masih meminjam bahasa bekas penjajahnya sendiri. Peristiwa yang kini melanda Malaysia, mengajak kita berpikir lebih luas dan mendalam.

Pergolakan di Malaysia

Pergolakan mutakhir di Malaysia tidak mempersoalkan lagi, apakah bahasa Malaysia tetap hendak dijadikan bahasa nasional, tetapi pemakaian huruf untuk bahasa tertulis resmi bahasa Malaysia.

Belakangan ini pemerintah di beberapa negara bagian Malaysia memasang papan-papan nama lembaga dan jalan dengan huruf Latin dan Jawi (Arab). Hal ini ditentang warga non-Melayu. Bukannya mereka anti pada bahasa dan huruf Arab. Mereka keberatan, jika huruf Jawi itu diberi status sederajat dengan bahasa Malaysia, yang sudah sering ditulis dengan huruf Latin.

Tangan-tangan jahil kemudian mencoret-coret tulisan Jawi itu dengan cat hitam. Warga ras Melayu menjadi marah. Hal itu dianggap sebagai penghinaan terhadap ras Melayu dan agama Islam.

Para tokoh organisasi non-Melayu menyatakan alasan keberatan mereka. Penjawian bahasa Malaysia dicurigai akan menyudutkan kedudukan warga non-Melayu. Mereka sudah merasa kerepotan belajar bahasa Melayu. Kerepotan ini akan berganda, jika mereka harus juga mempelajari tulisan Jawi.

Para pemuka warga Melayu mempunyai alasan tersendiri. Tak kurang dari Menteri Pendidikan, Anwar Ibrahim, ikut mendukung mereka. Ia mengancam para pemrotes non-Melayu itu sebagai pihak yang tidak memahami sejarah dan kebudayaan Melayu. Memang, pada awal penyebarannya sebagai bahasa tulisan, bahasa Melayu ditulis dengan huruf Jawi, bukan huruf Latin.

Laporan yang sama memberitakan, bahwa secara diam-diam kedua pihak yang bersitegang sama-sama mengakui, bahwa masalah ini bisa meledak menjadi kerusuhan rasial, jika tidak segera diselesaikan secara tenang dan damai. Pada kedua kubu terdapat kaum ekstremis. Diperkirakan, masalah itu akan muncul secara menonjol pada adu kampanye pemilihan umum mereka yang mendatang.

Di Indonesia

Peristiwa di atas tampaknya tidak akan terjadi di Indonesia, biarpun: (a) bahasa Indonesia juga bersumber dari bahasa Melayu, yang sejarahnya tak terpisahkan dari huruf Jawi; dan (b) mayoritas penduduk Indonesia (melebihi Malaysia) beragama Islam yang juga tak terpisahkan dari tulisan Arab.

Setidak-tidaknya ada dua sebab penting yang meniadakan atau mengecilkan kemungkinan menularnya peristiwa di Malaysia itu ke Indonesia. Pertama, bahasa Melayu tertulis yang berkembang bersama awal sejarah penerbitan pers di Hindia-Belanda menggunakan huruf Latin. Tradisi penulisan Jawi tidak berkembang di Indonesia. Kedua, perkembangan sosial-budaya Indonesia setelah kemerdekaan, dipengaruhi secara dominan oleh tradisi budaya Jawa, yang justru menjadi saingan utama dan turun-temurun bagi tradisi budaya Melayu-Islam.

Memang, bukan bahasa Jawa tetapi Melayu yang terpilih sebagai induk bahasa nasional di Indonesia. Sebab: (a) "jasa" penjajah Belanda yang tanpa disengaja mempromosikan dan menyebarkan bahasa Melayu untuk kepentingan administrasi pemerintahannya; (b) pilihan penjajah itu adalah bahasa (sebagian pribumi yang dijajah, sehingga punya makna pemersatu bagi kaum nasionalis; dan (c) bahasa Jawa tidak saja rumit, tetapi bertingkat-tingkat, yang dianggap tidak cocok dengan semangat "kemerdekaan" manusia sederajat oleh kaum nasionalis.

Ada yang berkomentar, bahwa pemilihan bahasa nasional di Indonesia itu menjadi "bukti" akan kemurahan hati/rendah hati orang Jawa untuk mengalah. Mungkin ini ada benarnya, tetapi juga kebenaran yang terbatas. Sejak kemerdekaan Indonesia, budaya tradisi Jawa bukannya mundur kocar-kacir dari kehidupan sosial kebangsaan Indonesia; justru sebaliknya. Warna kejawaan dalam pertumbuhan lebih lanjut pada bahasa (maupun budaya secara umum) nasional di Indonesia, sudah teramat sering dibahas orang, sehingga tak perlu diulang di sini. Yang perlu ditekankan di sini hanyalah tergesernya ke-Melayuan bahasa, sastra dan berbagai bentuk ungkapan budaya nasional di Indonesia. Karenanya tulisan Jawi hampir-hampir tak punya peluang untuk tumbuh di sini, sebagaimana yang terjadi di Malaysia.

Dengan segala perbedaan Malaysia-Indonesia itu, bukannya tak ada hal penting yang dapat kita pelajari dari peristiwa mutakhir di Malaysia itu. Khususnya dalam konteks merajalelanya demam pembakuan bahasa di Indonesia saat ini. Terlebih khusus lagi, pembakuan ejaan tulisan.

Peristiwa di Malaysia menunjukkan pada kita, bahwa pilihannya suatu bahasa nasional belaka belum menjamin kesatuan, "stabilitas dan keamanan" nasional. Masalah penulisan bahasa pilihan itu bisa menjadi persoalan besar. Masalah penulisan bahasa nasional di Indonesia bukannya tak ada, walau tidak seberat di Malaysia saat ini. Masalah penulisan di Indonesia yang kini membengkak, ialah pembakuan. Tapi ini pun baru masalah yang keluar ke permukaan. Di bawahnya terbentang dasar permasalahan yang jauh lebih berat bobotnya.

Tak pernah netral

Terdapat satu cacat yang sangat fundamental pada pandangan sebagian besar kaum tersekolah di Indonesia (termasuk para ahlinya) tentang bahasa. Bahasa dipahami terutama atau hanya sebagai "alat" komunikasi. Seperti semacam perkakas mesin. Seakan-akan

isi komunikasi verbal (pikiran/perasaan) dan bentuk (kata-kata tersusun: bahasa) pada hakikatnya merupakan dua hal terpisah. Kalaupun kaitan di antaranya diakui, biasanya pengakuan itu terbatas pada kaitan eksternal belaka. Cacat begini justru tidak terdapat pada pemahaman masyarakat pribumi tradisional, yang tidak atau kurang tersekolah.

Ejaan dan huruf diperlakukan seperti sekrup-sekrup sebuah mesin yang disebut bahasa. Para pembina "bahasa baik dan benar" bekerja seperti montir atau teknisi yang giat mereparasi alat komunikasi nasional itu. Ini tidak dengan sendirinya berarti mereka berniat buruk. Mungkin justru sebaliknya. Tetapi praktek pembinaan dan pengembangan bahasa semacam itu rupanya telah menjadi salah satu penyebab utama dari bosan dan muaknya para siswa mengikuti pelajaran bahasa nasionalnya sendiri.

Padahal tidak ada bahasa atau pun bagian terkecil dari suatu bahasa yang bersifat netral obyektif, atau yang terlepas dari nilai dan fungsi sosial; politik, ekonomi, kebudayaan. Atau yang sama-sama dapat dipakai (sebagai "alat") untuk kebaikan atau keburukan oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja. Masalah kebahasaan tidak pernah dapat direduksi menjadi sekadar masalah teknis kemoneteran dalam menjalankan mesin bahasa. Sebab yang paling mendasar dapat dijelaskan secara singkat dan bersahaja: bahasa itu buatan manusia bermasyarakat. Tidak ada pikiran, tindakan atau hasil kerja manusia bermasyarakat yang steril atau netral dari kepentingan-kepentingan sosialnya: ekonomi, politik atau kebudayaan.

Hanya kadang-kadang dan hanya sebagian kecil belaka dari hakikat dan watak bahasa yang tak netral itu, pernah disinggung kaum sekolahan di Indonesia. Yakni pada lingkup masalah pembentukan kata (leksikal), makna kata (semantik) atau tingkatan (khususnya Krama-Ngoko Jawa). Misalnya penyerapan kata (leksikal) dari bahasa asing dan Jawa, yang mendominasi bahasa Indonesia mutakhir. Atau (semantik) pengertian "pelacur", yang hampir selalu diidentikkan dengan "wanita tuna susila". Padahal para wanita itu ber"asusila" dengan lelaki. Namun toh tak biasa orang berbicara "lelaki tuna susila". Juga tentang (tingkatan) status Krama-Ngoko yang asimetris.

Ketidak-netralan bahasa tidak hanya terbatas pada ketiga hal di atas, tetapi juga pada semua unsurnya, termasuk morfologi, fonetik, sintaksis dan yang menjadi fokus kita di sini: aksara penulisan. Memang tak mudah menjelaskan ketidak-netralan hal-hal tersebut belakangan ini. Tapi ini bukan berarti, tidak atau kurang penting (justru sebaliknya!) dan bukan tak mungkin dijelaskan.

Seperti yang diungkapkan Alton L. Becker, justru kekuatan tersamar penjajahan manusia atas manusia lain berlangsung pada kerangka berpikir, dan bukannya isi pikiran, si terjajah. Kerangka struktural berpikir, berbahasa dan bermasyarakat itu justru terletak pada unsur-unsur kebahasaan yang paling jarang dibahas tadi (termasuk aksara).

Di antara para ahli sekolahan yang teramat langka menyadari hal-hal ini, muncul hasil penelitian mutakhir Geoffrey Benjamin. Dengan cerdik ia memaparkan, bagaimana setiap awalan/sisipan/akhiran (morfologi) dalam bahasa kita tidak bersifat statis, netral dan berfungsi gramatikal-linguistik

belaka, tetapi dinamis, berubah-ubah sesuai dengan perubahan historis tata politik-ekonomi-kebudayaan masyarakat kita.

Dalam masyarakat tradisional di sekitar Asia Tenggara (mungkin juga lainnya), kaitan internal antara bahasa dan kehidupan sosial itu justru dipahami dengan baik. Alton L. Becker menunjukkan kasus demikian di Burma. Mary S. Zurbuchen menampilkan kesadaran serupa dalam tradisi masyarakat di Bali. Di Jawa maupun kawasan Melayu, kaitan serupa itu dipahami dengan baik. Karena itu mereka tidak seperti kaum sekolahan kita, yang suka mengutip pepatah Inggris, "apalah artinya sebuah nama".

Kedua pihak yang bersitegang di Malaysia dalam peristiwa tersebut tadi, juga belum mengungkapkan luar biasanya dampak suatu perubahan tradisi penulisan. Kaum Melayunya baru mengungkapkan nilai simbolik lama tulisan Jawi, tanpa penjelasan kaitannya dengan situasi sosial masa kini. Kaum non-Melayunya menentang penjawian, hanya karena alasan-alasan teknis-praktis.

Masalah yang mendasar ialah, apakah suatu sistem penulisan sekadar berupa "alat" yang netral, terpisah dari bahasa apa pun yang ditulisnya, sehingga setiap sistem penulisan dapat digunakan untuk menuliskan bahasa macam apa pun tanpa perubahan yang fundamental? Tidak! Setiap sistem penulisan yang memasyarakat, akan selalu membatasi dan menentukan baik jenis maupun isi pikiran dan tata kesadaran masyarakat akan realitas dunianya.

Bahasa Melayu (atau bahasa apa pun) yang memasyarakat, sebagai bahasa lisan belaka, akan mengalami perubahan fundamental sejak dimasyarakatkan sebagai bahasa tulisan. Bahasa Melayu yang dituliskan dengan huruf-huruf Jawi, akan sangat berbeda dari bahasa yang sama, jika dimasyarakatkan dengan huruf-huruf Latin. Perbedaan kebahasaan itu selalu menyatu dengan perbedaan kesadaran, juga tata kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan.

Huruf-huruf Latin tersusun secara linier dan sekuensial. Hal ini menyatu, sebagaimana ditafsirkan Alton Becker, dengan sejarah bahasa-bahasa Barat yang bertenses, dan perkembangan kesadaran analitis hukum sebab-akibat. Perkembangan ini selanjutnya dipertegas oleh perkembangan kapitalisme peretakan sejak abad ke-15. Huruf-huruf dalam tulisan Latin menjadi individu-individu yang terangkai secara analitis, masing-masing mandiri.

Baik tulisan Jawi maupun Jawa mempunyai hakikat dan watak yang berbeda dari penulisan huruf-huruf Latin. Tulisan Jawi maupun Jawa tidak berderet-deret secara rapi membentuk barisan linier. Masing-masing huruf tidak bersifat statis dan berdiri sendiri-sendiri secara mandiri, tetapi selalu berubah baik bentuk maupun letaknya, menurut konteksnya; tergantung pada lingkungan huruf-huruf lain di sekitarnya.

Hanya 5 (alif, ra, wau, dal, zai) dari ke-34 huruf Jawi yang kurang peduli pada lingkungannya dan terpisahkan dari rangkaian kalimat tertulis. Hampir setiap huruf Jawi mempunyai bentuk dan letak yang berbeda-beda, jika mendahului, didahului atau dikelilingi huruf-huruf lain. Hal yang serupa terdapat pada penulisan aksara Jawa. Cokro pada tulisan

Jawa bahkan tidak saja menolak berbaris rapi dengan naik atau turun dari rangkaian huruf-huruf lain, tetapi melingkari huruf lain. Aksara Jawa bahkan menyediakan huruf-huruf khusus untuk menyatakan pihak yang sangat dihormati. Juga masih tersedia serangkaian huruf istimewa lain untuk menyatakan nama yang asing. Bandingkan dengan huruf besar, huruf miring atau garis bawah dalam tulisan Latin, untuk memberikan tekanan khusus pada makna kata: semuanya berlaku seragam untuk huruf atau kata apa pun.

Perlu juga diperhatikan, bagaimana huruf Jawa dan terlebih-lebih huruf Jawi tidak terlalu memisah-misahkan apa yang disebut huruf hidup versus huruf mati ala penulisan Latin. Pertentangan ala pembina bahasa Indonesia yang "baik dan benar", misalnya ejaan mana yang benar "anggota" atau "anggauta", akan kedengaran lucu bagi mereka yang berbahasa Melayu dengan huruf Jawi. Untuk bisa membaca dan mengerti tulisan-tulisan Jawa dan Jawi, kita benar-benar dituntut memperhitungkan konteks. Bahkan kadang-kadang kita dituntut pernah kenal kata yang dituliskan dalam huruf Jawi itu.

Singkatnya, penulisan seperti Jawa dan Jawi tampaknya menjadi bagian dan sekaligus menyatu dalam dinamika kehidupan sosial yang sangat "kontekstual" dan partisipatif. Karena itu ungkapan dalam masyarakat mereka serba implisit atau tersirat, dengan kemungkinan makna berlipat ganda dan tidak seragam baku.

Penulisan huruf Latin yang dimasyarakatkan di sekitar Indonesia dan Malaysia, tampaknya berkait erat dengan semakin mudarnya ungkapan-ungkapan pepatah dan peribahasa berkias. Singkat tapi padat. Sebagai gantinya, bermunculan uraian-uraian analitis yang serba eksplisit dan khawatir akan makna ganda. Keluhan kaum tua Jawa, bahwa tulisan-tulisan berbahasa Jawa sekarang terlalu ke-Indonesia-an, agaknya juga harus dikaitkan dengan mudarnya sosialisasi penulisan aksara Jawa.

Sangatlah jitu, jika pemerintah Orde Baru melarang penulisan huruf Cina di Indonesia. Biarpun tulisan itu berbunyi "Coca-Cola" atau "Pancasila". Sebab pada susunan dan watak tulisan itulah tersimpan rahasia tata kesadaran dan pemikiran orang.

Ejaan baku Indonesia

Di Indonesia tidak terjadi per-

tentangan besar-besaran mengenai penggunaan huruf Latin. Jadi, apa relevansi uraian di atas secara khusus untuk kasus Indonesia mutakhir? Jawabnya dapat dimulai dari pengamatan akan pembakuan ejaan bahasa nasional kita. Hasil penelitian G. Benjamin memberikan bahan jawaban yang sangat mendasar.

Obsesi kaum elit sekolah di Indonesia mengenai pembakuan bahasa pada umumnya dan ejaan khususnya, dapat dipandang sebagai pertanda: (a) mudarnya keakraban bermasyarakat sekonteks; (b) menggebu gairah berbahasa seefisien mungkin; (c) keseragaman makna dan kesadaran sosial mengungguli kemajemukan. Bahasa kita yang semakin formal dan analitis menuntut perincian dan pengeksplisitan ungkapan. Seakan-akan kita saling berhubungan sebagai orang yang asing satu sama lain. Yang tak saling kenal konteks satu sama lain, sehingga setiap bagian ungkapan mesti dieksplisitkan secara seragam.

Penyeragaman dan pengefisienan berbahasa, berpikir dan bermasyarakat akan mendukung kerja "pembangunan" industrial; juga menjamin "stabilitas dan keamanan" politik-ekonomi-kebudayaan.

* **Ariel Heryanto**, mengajar pada Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.